



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MAKALAH
**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

Pada Seminar Nasional
STRATEGI INOVASI KEBIJAKAN
DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI DAERAH
Bandung, 30 November 2006

**STABILITAS POLITIK DALAM ERA DEMOKRATISASI SEBAGAI
PRASYARAT IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF**

Saudara-saudara sekalian
peserta seminar yang berbahagia,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama perkenalkan saya secara tulus mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridha Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan ini untuk mengikuti acara Pada Seminar "STRATEGI INOVASI KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI DAERAH".

Pada kesempatan yang berharga ini, sesuai dengan permintaan Penyelenggara Seminar, kami menyiapkan topik pembahasan "STABILITAS POLITIK DALAM ERA DEMOKRATISASI SEBAGAI PRASYARAT IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF".

Permasalahan mengenai keterkaitan antara stabilitas politik dengan pembangunan ekonomi adalah permasalahan klasik yang sudah menjadi

perhatian, sekaligus keprihatinan semua pihak di negeri ini selama beberapa dasawarsa. Hal ini kemudian menjadi persoalan yang makin krusial sejak Indonesia mengalami transformasi politik yang sangat mendasar selama beberapa tahun terakhir ini. Selanjutnya kemudian meluas menjadi persoalan keterkaitan antara konsolidasi demokrasi di satu pihak serta pada lain pihak upaya peningkatan peran investasi swasta dan peningkatan kemakmuran rakyat ataupun kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan perjalanan proses demokratisasi dan pendewasaan politik masyarakat, persoalan ini memang masih terus menjadi pembahasan dan perdebatan yang panjang, baik di kalangan pengambil keputusan politik maupun praktisi serta para pemerhati persoalan-persoalan ekonomi dan sosial politik kemasyarakatan. Oleh karena itulah, saya menyambut positif upaya LAN mengangkat kembali wacana penting ini dalam forum pendidikan yang sangat terhormat ini.

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Pada umumnya sudah diakui bahwa demokrasi jelas bukan merupakan sistem yang sempurna. Sistem ini memiliki cukup banyak kelemahan, yang kemuliaan tujuannya seringkali dapat dikalahkan oleh berbagai macam kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan secara sempit. Namun demikian, demokrasi merupakan sistem penyelenggaraan negara yang memiliki mekanisme kontrol yang paling kuat terhadap kekuasaan, perumusan kebijakan dan proses politik. Sesuai dengan namanya, dalam demokrasi rakyatlah yang memiliki otoritas secara fundamental untuk mengajukan tuntutan, dukungan, serta mengatur diri dan kehidupannya baik dalam tingkat masyarakat maupun negara. Dalam implementasinya rakyat mewakilkan pemenuhan aspirasi dan kepentingannya kepada individu, kelompok, dan partai-partai melalui mekanisme Pemilu yang bebas dan mekanisme-mekanisme lainnya sesuai Konstitusi dan perundang-undangan yang juga harus mendapatkan persetujuan rakyat.

Demokrasi modern dianggap sudah teruji, antara lain karena memiliki pemahaman yang cukup mendasar tentang sifat-sifat dan kelemahan manusia sebagai individu serta sebagai pimpinan yang berwenang mengambil keputusan politik untuk kepentingan publik, kemudian menyediakan mekanisme untuk memunculkan hal-hal yang terbaik dari sifat-sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan kehidupan bersama yang tertata secara baik untuk semuanya. Demokrasi mengutamakan kekuatan sistem perwakilan politik dan penyelenggaraan negara yang taat pada asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga setiap saat rakyat memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan.

Namun cukup sering terjadi, pada saat-saat mengalami krisis ekonomi, tidak sedikit orang yang kehilangan kepercayaan dan kesabarannya pada demokrasi. Proses pengambilan kebijakan politik dalam sistem demokrasi memang seringkali dianggap menjadi biang keladi kemandegan, kurang efektif dan dianggap kurang produktif bagi kebutuhan-kebutuhan ekonomis yang memerlukan keputusan yang serba cepat di bidang produksi dan penanaman modal (investasi).

Pada kondisi seperti inilah banyak kalangan yang tergoda untuk mengembalikan proses politik yang mengandalkan kepada KHARISMA ORANG KUAT, bukan pada SISTEM POLITIK YANG KUAT. Padahal stabilitas politik yang mengandalkan pada kekuatan orang tertentu sangat rentan pada goncangan-goncangan kepentingan politik serta rawan penyalahgunaan kekuasaan atau KKN.

Ada sebuah pendapat yang menarik mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Amartya Sen, seorang pemenang Nobel Ekonomi beberapa tahun lalu, berdasarkan berbagai studi dan observasinya merumuskan kesimpulan penting mengenai peran demokrasi dalam mencegah kehancuran ekonomi. Menurut pengamatan Sen, meskipun tidak ada jaminan bahwa demokrasi dipastikan akan memberikan kemakmuran, namun berbagai

bencana kemiskinan dan kelaparan cenderung lebih mampu diatasi dalam suatu demokrasi, dibandingkan sistem otoriter. Ini dikarenakan para pemimpin negara dan tokoh politik umumnya lebih sadar akan tanggung jawabnya pada masyarakat yang memilihnya. Oleh karena demokrasi menekankan pentingnya mekanisme perwakilan, pengawasan dan proses politik yang representatif, maka bolehlah dikatakan, bahwa stabilitas politik yang dicapai dalam suatu demokrasi akan lebih berkelanjutan (*sustainable*) dibandingkan dengan stabilitas politik dalam sistem yang bersifat otoriter.

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Sehubungan dengan perlunya stabilitas politik yang lebih berkelanjutan itulah, maka ada beberapa hal pokok yang perlu diketengahkan agar konsolidasi demokrasi memiliki keterkaitan yang makin kokoh dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pertama, perlunya peningkatan KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Ketergantungan ekonomi yang cukup besar selama beberapa dekade terhadap bantuan dana luar negeri untuk membiayai pembangunan harus dibenahi karena cenderung menjadi penghambat bagi upaya peningkatan demokrasi ekonomi. Pemerintah yang demokratis diharapkan mampu melakukan upaya-upaya inovatif yang sungguh sungguh dan berkelanjutan untuk meningkatkan mobilisasi dana dari dalam negeri sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara besar-besaran perlu pula dikonsentrasikan pada upaya peningkatan produktifitas dan efisiensi. Selain itu, peran APBN yang selama ini cenderung masih menjadi andalan dalam membiayai pembangunan nasional harus lebih diimbangi oleh sumber-sumber swasta dan masyarakat luas.

Perekonomian dan pelaku-pelaku ekonomi dalam sebuah demokrasi yang terkonsolidasi tidak dapat dikelola berdasarkan ekonomi komando, namun sebaliknya tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang murni. Ekonomi komando seringkali mengakibatkan timbulnya rasa ketidakadilan dan ketidak-efisienan dalam perekonomian. Sebaliknya perekonomian yang sepenuhnya mengacu pada mekanisme pasar yang murni dapat menjadi sebab timbulnya ketidakadilan yang meluas, yang pada gilirannya menjadi sebab kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mendukung terciptanya rasa keadilan dan efisiensi, serta menjamin berjalannya perekonomian seperti yang diharapkan, diperlukan demokrasi yang terkonsolidasi. Dengan demikian, perlu dilakukan pemberdayaan kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan dukungan kuat dari parlemen dan pemerintah, dengan menerapkan strategi bersama yang sekaligus pro pada kemandirian ekonomi nasional.

Kedua, perlu dimulainya proses rasionalisasi politik nasional secara serius, terkoordinasi dan terlembaga. Dewasa ini, sejak berakhirnya Orde Baru pada 1998, polarisasi kekuatan politik sipil masih cenderung ke arah menguatnya ikatan-ikatan politik yang bersifat kurang rasional serta lebih banyak mengutamakan sentimen-sentimen keagamaan yang sempit dan simbol-simbol kedaerahan yang bersifat eksklusif. Hal ini cenderung tidak mendukung kehidupan demokrasi politik secara modern dan efektif dalam melayani kepentingan-kepentingan masyarakat sipil secara luas.

Destabilitas politik dapat mudah sekali dipicu oleh pertentangan dari berbagai kelompok-kelompok yang seringkali kurang rasional secara politik. Pertentangan ataupun konflik antara parpol dan organisasi masyarakat yang berorientasi pada ikatan tradisional seringkali bertentangan dengan kepentingan nasional yang memerlukan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Padahal stabilitas politik merupakan salah satu kunci dari pemulihan perekonomian dan selanjutnya pengembangan sistem perekonomian yang pro-masyarakat banyak. Amandemen terhadap perundang-undangan Pemilu dan

Partai Politik merupakan salah jalan yang perlu ditempuh dalam proses rasionalisasi kehidupan politik nasional.

Ketiga, penegakan supremasi hukum, yang pada satu sisi berarti memperkuat independensi lembaga peradilan dan membersihkan lembaga-lembaga penegakan hukum dari KKN. Pada sisi lain, penegakan supremasi hukum bermakna melakukan reformasi sistem hukum dan perundang-undangan nasional serta memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak yang memerlukannya.

Konstitusi dan perundang-undangan sudah harus mampu merumuskan perimbangan antara penguasaan negara atas perekonomian dan swasta, terutama dalam hal industri-industri vital dan strategis, atau kalau tidak dikuasai namun diregulasi secara memadai untuk mengoptimalkan fungsi sosial. Sedangkan untuk swasta nasional dan asing, kepastian hukum dan aturan main mesti dijalankan secara konsisten dan berkeadilan.

Konsolidasi demokrasi tanpa adanya dukungan supremasi hukum merupakan sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Salah satu sasaran dari konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang adalah terwujudnya negara hukum (*rechtsstaat*). Kegagalan menarik investasi asing serta tingginya biaya ekonomi karena korupsi, produktivitas dan efisiensi yang rendah, berawal dari tidak adanya kepastian hukum, diperparah oleh sistem hukum dan perundang-undangan yang seringkali bertentangan satu sama lainnya. Tidak adanya kepastian hukum juga mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan diskriminasi dan manipulasi hukum dalam menangani kasus-kasus sengketa ekonomi dan niaga serta kasus-kasus korupsi berskala besar maupun kecil. Hukum harus mampu menjamin keadilan untuk semua orang yang menjadi subyek hukum (JUSTICE FOR ALL) di wilayah NKRI, termasuk para investor asing yang menanamkan modalnya di negeri ini.

Keempat, yang tidak kurang penting adalah diwujudkannya penyelenggaraan negara secara transparan dan akuntabel, serta partisipasi

politik secara nyata dari masyarakat terhadap perumusan-perumusan kebijakan publik. Aparatur negara diharapkan memiliki standar kemampuan minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program pemerintah terpilih, bersih dari korupsi, dan efektif dalam melaksanakan tugas profesinya, berdasarkan asas *the right man on the right place*. Baik aparatur birokrasi sipil maupun militer harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan ketentuan perundang-undangan serta hukum positif.

Konsekuensi sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) adalah perlunya netralitas dalam politik. Hal ini tentu bukan berarti para pejabat publik dan birokrasi kehilangan hak politik sebagai warganegara. Aparatur birokrasi diharapkan memiliki dan dapat menggunakan hak suaranya secara penuh dalam memilih wakil-wakilnya di parlemen dan memilih kepala negara/pemerintahan. Aparatur penyelenggaraan negara diharapkan tidak merangkap pekerjaan profesi politik dalam sistem kepartaian pada saat sedang menduduki jabatan di birokrasi.

Kelima, yang seringkali agak diremehkan, padahal sangat menentukan terciptanya stabilitas politik dan eksistensi demokrasi yang kuat adalah perlunya politik luar negeri dan kerjasama internasional yang lebih terfokus pada upaya mendukung pemulihan dan pengembangan sistem perekonomian nasional yang lebih kokoh dan mandiri. Diplomasi internasional yang pro-aktif sangat diperlukan dalam mempromosikan potensi-potensi ekonomi Indonesia di luar negeri.

Kelemahan diplomasi Indonesia selama ini sudah banyak menyebabkan kerugian dan kekalahan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta banyak menyebabkan kesengsaraan yang tidak perlu bagi warganegara Indonesia di luar negeri. Sebagai contoh, masalah sengketa pulau di daerah perbatasan yang gagal dimenangkan serta tragedi terusnya ratusan ribu TKI serta perlindungan hukum yang lemah atas pekerja Indonesia di luar negeri adalah karena lemahnya diplomasi.-

Selain itu, kekuatan diplomasi pada satu pihak diharapkan mampu menumbuhkan keyakinan pada para calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan pada lain pihak meyakinkan dunia internasional bahwa stabilitas politik Indonesia merupakan juga jaminan terhadap stabilitas politik regional dan internasional. Oleh karena itu, dukungan internasional pada konsolidasi demokrasi di Indonesia merupakan suatu keharusan bagi keamanan internasional.

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Apabila hal-hal di atas diimplementasikan secara berkesinambungan dan konsisten, maka diharapkan iklim investasi yang kondusif, demokrasi ekonomi dan kemakmuran rakyat dapat dicapai secara bertahap dalam kerangka besar konsolidasi demokrasi.

Demikianlah, semoga Allah Yang Maha Kuasa memberi rahmat dan karunia-Nya bagi semua itikad baik kita bagi bangsa dan tanah air tercinta.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, 30 November 2006

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta